# BAB I PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

* + 1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
		2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
		3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
		4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

# Landasan Hukum

* + 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748)
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014 –2018
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Serang;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang RKPD Tahun 2019.

#  Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Tahun 2019 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

* + 1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial tahun 2019 - 2023.
		2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
		3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
		4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
		5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

# Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2019 sebagai berikut:

* + 1. BAB I PENDAHULUAN
			1. Latar Belakang
			2. Landasan Hukum
			3. Maksud dan Tujuan
			4. Sistematika Penulisan
		2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.
			1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
			2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
			3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
			4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
		3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
			1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
			2. Program dan Kegiatan OPD Tahun2019
		4. BAB IV PENUTUP

# BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Renja Tahun 2019 terdiri dari 7 Program dan 33 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

# Program Pelayanan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

* + - 1. Pelayanan administrasi perkantoran
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
			3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
			4. Peningkatan kapasitas Aparatur
			5. Penyediaan Dokumentasi, informatika, dan komunikasi OPD
			6. Pengelola Barang Milik Daerah.
			7. Penyediaan Makanan dan Minuman
			8. Rapat –Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

# Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

* + - 1. Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran

# Program Peningkatan perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan capaian kinerja

* + - 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah
			3. Pengendalian dan evaluasi kinerja
			4. Penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan perangkat daerah
			5. Penyusunan data dan profil perangkat daerah

# Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin

* + - 1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tugas pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.

B Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.

C. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin.

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
2. Identifikasi dan analisis penanganan Fakir Miskin.

# Program perlindungan dan Jaminan sosial

* + - 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
			2. Jaminan Sosial keluarga
			3. Updating data kemiskinan PMKS dan PSKS

# Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

* + - 1. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku- pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
			2. Peningkatan kualitas SDM kesejteraan sosial masyarakat.
			3. Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan
			4. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

# Program rehabilitasi sosial

* + - 1. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia.
			2. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi antar termasuk anjal, anak disabilitas dan anak korban NAPZA.
			3. Penyusunan data dianalisis permasalahan anak terlantar.
			4. Pengembangan bakat dan kreatifitas anak.
			5. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
			6. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban exploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
			7. Pendidikan dan pelatihan berusaha bagi exs penyandang penyakit sosial.

**2.1.1** **Laporan realisasi kegiatan dan anggaran Tahun 2017**

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan 12 Program yang terdiri dari 45 Kegiatan, Dinas Sosial Kota Serang dalam Tahun Anggaran 2017 sudah melaksanakan program kegiatan dengan efisien dan efektif. Pagu Anggaran Dinsos Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 9.241.460,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.868.133.454,- dan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 6.373.327.375,-

Realisasi Belanja Dinas Sosial Kota Serang pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 8.808.103.248,- atau mencapai 95,31 % dari jumlah anggaran yang tersedia. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 6.096.821.978,- atau sebesar 95,66 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.711.281.270,- atau sebesar 94,53 %, Realisasi penyerapan dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp 8.808.103.248,- atau 95,31 % dengan rincian : realisasi diatas 90 % sebanyak 37 kegiatan, realisasi antara 80 % - 90 % sebanyak 3 kegiatan, realisasi antara 70 % - 80 % sebanyak 2 kegiatan , realisasi antara 60 % - 70 % sebanyak (0) kegiatan dan realisasi di bawah 60 % sebanyak 2 kegiatan.

Adapun dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017, Dinas Sosial Kota Serang melaksanakan 12 Program dan 45 kegiatan. Jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.373.327.375,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.6.096.821.978,- atau 95,66 %, uraian kegiatan beserta capaian indikator outputnya adalah sebagai berikut:

* + - 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.920.000,- atau 100 % dengan output dari rencana 1.740 lembar Meterai ( benda pos) atau 100%;
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 62.745.000,- terealisasi sebesar Rp. 61.049.840,- atau 97,30 % dengan output dari rencana 12 bulan tercapai 12 bulan atau 97,30%;
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 20.363.850,- terealisasi sebesar Rp. 19.061.500,- atau 93,60% dengan output dari rencana terbitnya STNK kendaraan 9 roda 4 dan 16 roda 2 tercapai 8 roda 4 dan 16 roda 2 atau 93,60%;
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana Kegiatan sebesar Rp. 80.887.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.8877.000,- atau 100 % dengan output dari rencana 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 100%;
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 45.652.500,- terealisasi sebesar Rp. 45.652.500,- atau 100 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%;
	6. Penyediaan Barang Cetakan atau Penggandaan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 74.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.691.000,- atau 92,95 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 92,95%;
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 20.625.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.480.000,- atau 99,30 % dengan output dari rencana 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 99,30%;
	8. Penyediaan Bahan Bacaan atau Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 10.771.500,- terealisasi sebesar Rp.10.532.000,- atau 97,78 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 97,78%;
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 40.975.000,- terealisasi sebesar Rp 39.230.000,- atau 95,74 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 95,74%;
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 579.462.875,- terealisasi sebesar Rp. 578.900.000,- atau 99,90% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 99,90%;
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 71.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.900.000,- atau 100% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%;
		+ 1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
	12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.45.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.819.000,- atau 91,11 %, dengan output dari rencana 7 Lemari arsip, 4 Filling Cabinet, 2 Lemari Buku, Kursi 14, Meja 4, 1 Plang terealisasi 7 Lemari arsip, 4 Filling Cabinet, 2 Lemari Buku, Kursi 14, Meja 4, 1 Plang atau 91,11%;
	13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.249.500.000,- terealisasi Rp. 241.161.000,- atau 96.66%, dengan output dari rencana 13 Laptop, 7 Printer, 2 Kamera, 3 Dispenser, 3 ac, 1 PC Komputer terelsasi 13 Laptop, 7 Printer, 2 Kamera, 3 Dispenser, 3 ac, 1 PC Komputer atau 96,66%;
	14. Pengadaan Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 190.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 188.350.000,- atau 98,92 %, dengan output dari rencana 2 gedung terealisasi 2 gedung atau 98,92%;
	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.221.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 216.400.596,- atau 97,72 %, dengan output dari rencana 9 unit roda 4 dan 16 unit roda 2 terealisasi 9 unit roda 4 dan 16 unit roda 2 atau 97,72%;
	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.040.000,- atau 55,20 %, dengan output dari rencana 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 55,20%;
	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 100%;
		+ 1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
	18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.060.000,- atau 92,24 %, dengan output dari rencana 28 stel terealisasi 28 stel atau 92,24%.
		+ 1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut** :
	19. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 53.070.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.070.000,- atau 100 %, dengan output dari rencana 2 Kegiatan terealisasi 2 Kegiatan atau 100 %.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 79.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.750.000,- atau 100% dengan output dari rencana 4 Dok (Laporan Kinerja,Perjanjian Kinerja, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja SKPD) 4 Dok (Laporan Kinerja,Perjanjian Kinerja, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja SKPD) atau 100 %
	2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.446.000,- atau 58,89 % dengan output dari rencana 3 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 58,89%.
	3. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan rencana anggaran Kegiatan Rp.25.000.000,-terealisasi sebesar Rp.23.060.000,- atau 92,24 % dengan Output dari Rencana 3 Bulan terealisasi 3 Bulan atau 92,24%.
	4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 23.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.920.000,- atau 100 % dengan output dari rencana 4 dokumen terealisasi 4 dokumen atau 100 %.
	5. Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 116.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.420.000,- atau 81,40 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 Bulan atau 81,40 %.
	6. Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 100.000,000.- terealisasi sebesar Rp. 92.880.892,- atau 92,88% dengan output dari 2 Dokumen, 1 Kegiatan terealisasi 2 Dokumen, 1 Kegiatan atau 92,88%.
	7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 28.599,950.- terealisasi sebesar Rp. 28.599.950,- atau 100% dengan output dari rencana 4 Dokumen terealisasi 4 Dokumen atau 100%.

**6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tugas pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 79.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.860.000,- atau 58,75 % dengan output dari rencana 2 Kegiatan (17.121 Orang) terealisasi 2 Kegiatan (17.121 Orang) atau 58,75 %.
	2. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 442.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 436.043.000,- atau 98,47 % dengan output dari rencana 1 kegiatan, 100 Org Kube FM (19 Kelompok) teralisasi 1 kegiatan, 100 Org Kube FM (19 Kelompok) atau 98,47 %.
	3. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 269.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 259.670.000,- atau 96,53 % dengan output dari 1 Kegiatan, 200 Orang PRSE (20 Kelompok) terealisasi 1 Kegiatan, 200 Orang PRSE (20 Kelompok) atau 96,53 %.
	4. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 220.425.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.545.000,- atau 95,06 %, dengan output dari rencana 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan atau 95,06 %.
	5. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 458.389.000,- terealisasi sebesar Rp. 416.573.000,- atau 90,88 %, dengan output dari 2 Kegiatan, 16 Unit RS-RTLH terealisasi sebesar 2 Kegiatan, 16 Unit RS-RTLH atau 90,88%.

**7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan anak, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.85.000,- terealisasi Rp. 80.650.000,- atau 94,88 % dengan output dari rencana 240 Orang / 3 Kali terealisasi 240 Orang / 3 Kali atau 94,88%
	2. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.88.425.000,- terealisasi Rp. 83.965.000,- atau 94,96 % dengan output dari rencana 40 Orang Peserta PMKS dan PSKS, 1 Pameran pembangunan, PMKS, PSKS, SLRT (1 Kegiatan) Terealisasi 1 40 Orang Peserta PMKS dan PSKS, 1 Pameran pembangunan, PMKS, PSKS, SLRT (1 Kegiatan) atau 94,96%
	3. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.31.525.000,- terealisasi Rp. 30.925.000,- atau 98,10 % dengan output dari rencana 2 Kali Kegiatan Sosialisasi terealisasi 2 Kali Kegiatan Sosialisasi atau 98,10%
	4. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.188.200.000,- terealisasi Rp. 188.200.000,- atau 100 % dengan output dari rencana 4 Kegiatan 19 Pendamping dan Operator PKH, 28 Pendamping Jamsosratu, 6 Petugas Pengolah Data 1 Gedung Sekretariat UPPKH Dinas Instansi terealisasi 4 Kegiatan 19 Pendamping dan Operator PKH, 28 Pendamping Jamsosratu, 6 Petugas Pengolah Data 1 Gedung Sekretariat UPPKH Dinas Instansi atau 100%
	5. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa , dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.445.000.000,- terealisasi Rp. 437.325.000,- atau 98,26 % dengan output dari rencana 1 Gudang Bufferstock, 1 Sekretariat Tagana 60 Anggota Tagana 60 Orang KSB, 4 Kali rapat Pembinaan KSB, 100 Orang Kegiatan Ekspedisi Kemanusiaan terealisasi 1 Gudang Bufferstock, 1 Sekretariat Tagana 60 Anggota Tagana 60 Orang KSB, 4 Kali rapat Pembinaan KSB, 100 Orang Kegiatan Ekspedisi Kemanusiaan atau 98,26%

**8. Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.839.000,- atau 87,37 % dengan output dari rencana 3 Kegiatan terealisasi 3 Kegiatan atau 87,37 %.

**9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.899.000,- atau 97,78 % dengan output dari rencana 1 Kali Kegiatan terealisasi 1 Kali Kegiatan atau 97,78 %.

**10. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.35.650.000,- atau 71,30% dengan output dari rencana 1 Kegiatan (50 Peserta) terealisasi 1 Kegiatan (50 Peserta), atau 71,30 %.

**11. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 75.065.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.215.000,- atau 94,87% dengan output dari rencana 2 Kegiatan Penjaringan dan Pembinaan terhadap penyandang Penyakit Sosial (80 Orang) , 2 Kegiatan Penjaringan dan Pembinaan terhadap penyandang Penyakit Sosial (80 Orang), atau 94,87 %.

**12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

* 1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 28.610.700,- terealisasi sebesar Rp. 27.910.700,- atau 97,55% dengan output dari rencana 1 kali Kegiatan (80 orang) terealisasi 1 kali Kegiatan (80 orang), atau 97,55 %.
	2. Peningkatan Jenjang kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.490.000,- atau 91,00% dengan output dari 40 Orang PSM, 4 Kegiatan terealisasi 40 Orang PSM, 4 Kegiatan, atau 91,00 %.
	3. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 115.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 102.140.000,- atau 88,82% dengan output dari rencana 100 Orang PSKS, 6 Orang TKSK, 66 Orang WKSBM terealisasi 100 Orang PSKS, 6 Orang TKSK, 66 Orang WKSBM, atau 88,82 %.
	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahalwanan dan Keprintisan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 349.930.000,- atau 99,98% dengan output dari 1 Keg, 1 TMPN, 1 Berkas, 3 Tugu, 1 Kegiatan Olimpiade, 1 Kegiatan Napak Tilas dan 1 Kegiatan Hari Pahlawan terealisasi 1 Keg, 1 TMPN, 1 Berkas, 3 Tugu, 1 Kegiatan Olimpiade, 1 Kegiatan Napak Tilas dan 1 Kegiatan Hari Pahlawan, atau 99,98 %.
	5. Pendataan dan Updating Data PMKS dan PSKS, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 927.190.000,- terealisasi sebesar Rp. 926.290.000,- atau 99,90% dengan output dari rencana 1 Kali Pendataan PMKS dan PSKS, 1 Kali Veri/Vali PBI JKN, 2 Kali Rapat Evaluasi,1 Kali Veri/vali Data Kemiskinan terealisasi 1 Kali Pendataan PMKS dan PSKS, 1 Kali Veri/Vali PBI JKN, 2 Kali Rapat Evaluasi,1 Kali Veri/vali Data Kemiskinan, atau 99,90 %.

**2.1.2** **Laporan realisasi kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2018**

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada Triwulan II Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Serang melaksanakan 12 Program yang terdiri dari 45 Kegiatan, Dinas Sosial Kota Serang dalam Tahun Anggaran 2018 sudah melaksanakan program kegiatan dengan efisien dan efektif. Pagu Anggaran Dinsos Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 8.442.943.676 ,- terealisasi Rp 3.229.137.151 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.226.039.916,- Realisasi sebesar Rp 1.589.673.001,- atau sebesar 49,28 % ,- atau mencapai 38,25 % Belanja Langsung sebesar Rp5.216.903.760,- terealisasi Rp 1.639.464.150,- atau sebesar 31,43%.realisasi antara 80 % - 100 % sebanyak 4 kegiatan, realisasi antara 70 % - 80 % sebanyak 2 kegiatan , realisasi antara 60 % - 70 % sebanyak 1 Kegiatan dan realisasi di bawah 60 % sebanyak 23 kegiatan. Sisanya masih ada 15 kegiatan yang belum terealisasi.

Uraian kegiatan beserta capaian indikator outputnya adalah sebagai berikut:

* + 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.150.000,- belum terealisasi.
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 55.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.115.000,- atau 16,38 %
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 29.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.415.500,- atau 42,39%.
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana Kegiatan sebesar Rp. 88.129.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.395.000,- atau 36,76 %
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 44.912.700,- terealisasi sebesar Rp. 17.698.000,- atau 39,41 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 8 bulan atau 39,41%;
	6. Penyediaan Barang Cetakan atau Penggandaan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 64.330.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.394.000,- atau 36,37 %.
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 19.135.000,- Blum Terealisasi.
	8. Penyediaan Bahan Bacaan atau Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 11.088.000,- Blum Terealisasi
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 39.495.000,- terealisasi sebesar Rp 9.042.250,- atau 22,89 %.
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 302.430.000,- terealisasi sebesar Rp. 95.000.000,- atau 31,41%
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 48.442.060,- terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 24,77% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 8 bulan atau 24,77%;
		1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**
			1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.389.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 280.000.000,- atau 71,90 %.
			2. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.46.470.000,- terealisasi Rp. 3.525.000,- atau 7,59%.
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.244.057.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.963.150,- atau 31,13 %.
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 13.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau 18,49%.
		2. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.530.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.760.000,- atau 47,97 %.
		3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 39.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.575.000,- atau 49,86 %.
		4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 67.070.000,- terealisasi sebesar Rp.33.250.000,- atau 49,58% .
			2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 48.120.000,- Belum Terealisasi.
			3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp48.890.000,- Belum Terealisasi.
			4. Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 547.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 112.850.000,- atau 20,63 %.
			5. Penyusunan Rencana Strategis SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 48.590.000.- Belum terealisasi.
			6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 73.590.000,- Terealisasi Rp. 69.590.000,- Atau 94,56%
			7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 87.180.000.- Terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 Atau 5,74%.
		5. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tugas pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp59.530.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.530.000,- atau 100 %.
			2. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 59.530.000,- belum terealisasi.
			3. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp 274.350.000,- belum terealisasi.
			4. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 74.530.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.800.000,- atau 54,74 %.
			5. Identifikasi dan analisis penanganan Fakir Miskin dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 99.530.000,- belum terealisasi.
			6. Sistem layanan dan Rujukan Terpadu dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 598.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.497.750.- atau 13,96 %.
		6. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan anak, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.48.890.000,- belum terealisasi.
			2. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal korban Narkoba (PACA), dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.30.150.000,- Belum terealisasi.
			3. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.146.550.000,- terealisasi Rp. 64.130.000,- atau 43,76 %.
			4. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa , dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.238.800.000,- terealisasi Rp. 114.663.500,- atau 48,02 % .
			5. Pelayanan dan Perlindungan bagi Lansia, dari rencana anggaran sebesar Rp. 148.890.000,- terealisasi Rp. 25.426.000,- atau 17,08 %.
		7. **Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 118.890.000,- belum terealisasi.
		8. **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dari rencana anggaran kegiatan 49.630.000,- Belum terealisasi.
		9. **Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.650.000,- belum terealisasi.
		10. **Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 74.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.995.000,- atau 17,51%.
		11. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**
			1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 27.650.000,- belum terealisasi.
			2. Peningkatan Jenjang kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 39.650.000,- belum terealisasi.
			3. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 48.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.300.000,- atau 89,74%.
			4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahalwanan dan Keprintisan, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 148.590.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.309.000,- atau 14,34%.
			5. Pendataan dan Updating Data PMKS dan PSKS, dari rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 448.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 380.075.000,- atau 84,84% .
			6. Pembinaan Sosial bagi pelaku pelaku usaha kesejahteran sosial, dari Rencana anggaran kegiatan Rp. 24.650.000,- Belum terealisasi.
	12. **Analisa Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan. Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di bantu dan ditangani. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana teknis kegiatan di lapangan dan dimasukkan kedalam tabel pelaporan, maka dapat diberikan analisa kinerja Dinas Sosial sudah terealisasi sebesar 38,25% sampai dengan Triwulan II TA 2018.

# Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penentuan isu-isu strategis ini DINSOS Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DINSOS Kota Serang lebih baik. Adapun isu-isu strategis itu adalah:

1. Meningkatkan Penanganan PMKS melalui Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial disertai dengan Profesionalitas, Pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan Pengembangan Iptek. Ukuran ataupun indikator atas profesionalisme adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan ataupun pekerjaan sesuai standar prosedur kerja yang telah ditetapkan. Kredibilitas dari DINSOS Kota Serang sendiri sebagai sebuah lembaga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, karena sifat dan pekerjaan dari DINSOS ini adalah pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di lingkungan DINSOS Kota Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Peningkatan dalam pembaharuan ***(updating)*** data PMKS harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial dengan perkembangan iptek haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.
2. Meningkatkan Pemberdayaan PSKS melalui Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. Potensi lain yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan.

# Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kota Serang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non fisik karena bukan merupakan pembangunan infrastruktur maupun gedung yang bisa dirasakan langsung pemanfaatannya oleh masyarakat. Pada usulan perencanaan kegiatan tahun 2019, Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi OPD terhadap program/kegiatan pada Tahun 2019 yang mencakup aspek pelayanan meningkatkan kemandirian bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan psks sehingga diperoleh masukan yang konstruktif sebagai bagian kontribusi dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Serang agar pelayanan kemandirian bagi PMKS dan PSKS menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

# BAB III

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

 Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui kementrian sosial RI Maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Janngka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dinas Sosial Provinsi Banten merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini dilakukan agar program/ kegiatan Dinas Sosial Kota Serang tetap linier dengan program/ kegiatan Dinas Sosial Provinsi sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/ kegiatan yang disusun oleh Kementrian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/ kegiatan tersebut. Dinas Sosial Provinsi telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam renstra Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS).

# Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dinas Sosial Kota Serang Belum membuat visi,misi, tujuan dan sasaran RENJA OPD karna berkaitan dengan belum dibuatnya RPJMD Kota Serang sesuai dengan visi misi Walikota Serang yang baru.

# Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD tahun 2018, analisis kinerja pelayanan OPD, isu- isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Serang tahun 2019.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Serang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

# Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **Rencana Tahun 2019** | **Catatan Penting** |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)** | **Sumber Dana** |
| **1106.01** | **Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | **1.915.101.266** | **APBD** |  |
| 001 | PelayananAdministrasi Perkantoran |  12 Bulan |  |  |  318.851.266 |  |  |
| 002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor | 3 motor, 20 mabeler,6 gedung, 6 unit peralatan kantor |  |  | 595.000.000 |  |  |
| 003 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor | 6 gedung, 27 kendaraan |  |  | 315.000.000 |  |  |
| 009 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 3 kegiatan, 70 orang |  |  | 140.000.000 |  |  |
| 010 | Penyediaan Dokumentasi,Informatika dan Komunikasi OPD | 12 Bulan |  |  | 150.000.000 |  |  |
| 011 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 dokumen |  |  | 75.000.000 |  |  |
| 012 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 12 Bulan |  |  | 40.000.000 |  |  |
| 013 | Rapat-Rapat kordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah. | 12 Bulan |  |  | 281.250.000 |  |  |
| **1106.02** | **Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | **67.500.000** | **APBD** |  |
| 001 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran. |  3 dokumen |  |  |  67.500.000 |  |  |
| **1106.03** | **Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capain kinerja** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | **336.648.734** | **APBD** |  |
| 001 | Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah | 1 kegiatan, 3 dokumen |  |  | 75.000.000 |  |  |
| 002 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | 2 dokumen |  |  | 55.000.000 |  |  |
| 003 | Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 4 dokumen |  |  | 55.000.000 |  |  |
| 004 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahun Perangkat Daerah | 4 dokumen |  |  | 87.725.000 |  |  |
| 005 | Penyusunan Data dan Profil perangkat Kerja | 25 buku dan CD |  |  | 63.923.734 |  |  |
| **1106.11** | **Program Penanganan Fakir Miskin** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | **929.300.000** | **APBD** |  |
| 001 | Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya | 4 kegiatan, 16.390 KPM |  |  | 96.000.000 |  |  |
| 002 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | 7 kelompok, 2 petugas pendamping |  |  | 170.000.000 |  |  |
| 003 | Fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin | 7 kelompok, 1 kegiatan, 2 petugas pendamping |  |  | 156.000.000 |  |  |
| 004 | Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | 1 kegiatan, 122 RTLH, 25 P2WKSS |  |  | 462.300.000 |  |  |
| 0055 | Indentifikasi dan Analisis data Fakir Miskin | 7 kelompok, 7 kelompok,145 unit,16.390 KPM |  |  | 45.000.000 |  |  |
| **1106.12** | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | **971.597.000** | **APBD** |  |
| 001 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | 40 orang(tagana,KSB,psikososial)200 paket bufferstock,100 orang ekspedisi kemanusiaan |  |  | 300.000.000 |  |  |
| 002 | Jaminan Sosial Keluarga | 40 orang(PKH,sosialisasi PKH,sosialisasi Jamsosratu)50 orang (evaluasi PKH,evaluasi Jamsosratu) |  |  | 200.000.000 |  |  |
| 003 | Updating Data Kemiskinan,PMKS dan PSKS | Petugas Bintek 77 orang, Bintek PBI,JKN 120 orang, Bintek updeting PMKS,PSKS 67 orang, evaluasi PBI,JKN,PMKS,PSKS 80 orang. |  |  | 471.597.000 |  |  |
| **1106.13** | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | **849.950.000** | **APBD** |  |
| 001 | Peningkatan Jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | 1 kegiatan, 50 PKS |  |  | 63.400.000 |  |  |
| 002 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | 1 kegiatan 28 LKS, 1 kegiatan 24 PSKS berprestasi, 1 kegiatan 30 LK3, 3 LKS bantuan |  |  | 100.750.000 |  |  |
| 003 | Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan | 4 kegiatan( hari pahlawan, pemeliharaan TMPN ciceri, olimpiade kepahlawanan, hari pahlawan nasional) 200 buku profil pahlawan |  |  | 150.000.000 |  |  |
| 004 | Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) | 11 kegiatan SLRT dan Puskesos, 1 kegiatan kampanye PMKS, 1 kegiatan UGB dan PUB, 1 kegiatan pameran |  |  | 535.800.000 |  |  |
| **1106.13** | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **12 Bulan** | **Dinas Sosial** | **100%** | 1.164.643.000 | **APBD** |  |
| 001 | Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi Lansia | 2 kegiatan senam lansia, 1 kegiatan bansos sembako lansia, 1 kegiatan rutin lansia, 2 kegiatan pembinaan petugas lansia,Tk Kec dan Kel. 1 kegiatan bantuan pelayanan kesehatan lansia. |  |  | 226.643.000 |  |  |
| 002 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi antar termasuk Anjal, Anak Disabilitas dan anak korban Napza | 1 kegiatan(penguatan kapasitas building anak PMKS, Anak jalanan dikirim ke PSBR jakarta, Pembinaan PSA, kewirausahaan Anjal. |  |  | 150.000.000 |  |  |
| 003 | Penyusunan Data di analisi permasalahan Anak Terlantar | 1 kegiatan penguatan LKSA, pendataan 100 anak terlantar, 1 kegiatan COTA. |  |  | 63.000.000 |  |  |
| 004 | Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Anak | 3 kegiatan(lomba minat bakat Tk Prov, UU no 35 Th 2014, bantuan perlengkapan sekolah antar) |  |  | 75.000.000 |  |  |
| 005 | Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat | 4 kegiatan(pelatihan tata boga disabilitas 30 orang, pembinaan petugas pendamping 11 orang, pemberian alat bantu kursi roda 45 pcs, tongkat 15 pcs , alat bantu dengar 2 pcs) |  |  | 250.000.000 |  |  |
| 006 | Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban Eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak | 23 penerima sembako, 30 korban kekerasan home visit, 20 orang pelatihan tata boga. |  |  | 150.000.000 |  |  |
| 007 | Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Penyandang penyakit Sosial | 70 orang pemberian bahan makanan pokok panti, 40 orang penjaringan penyakit sosial, 10 orang keterampilan perbengkelan |  |  | 250.000.000 |  |  |
| **JUMLAH** | 6.234.740.000 |  |  |

**BAB IV PENUTUP**

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada Tahun 2019 diharapkan sudah dapat dilaksanakan dengan paradigma baru. Selama ini masih menggunakan paradigma lama dengan pendekatan kelayakan sebagai penyandang masalah, sehinga orientasinya pada pemecahan masalah (problem solving). Sebagai konsekuensinya peran pemerintah lebih dominan melalui kegiatan Rehabilitatif, Penyantunan, Pemberian Bantuan dan lain- lain. Dalam jangka panjang ternyata paradigma ini menciptakan sikap malas, ketergantungan yang tinggi, dan hanya berharap bantuan pemerintah, di kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial menuntut pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah

Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial lebih dikenal dengan istilah *Employment Community For Development,* artinya memandang penyandang masalah sosial dari segi potensi dan kemampuan internalnya. Paradigma ini tidak melihat kelayakan sebagai orang bermasalah. Mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan berusaha, sehingga perlu dioptimalkan. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan potensi melaui kegiatan pemberdayaan. Pada paradigma ini peran pemerintah sangat kecil dan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. Dengan paradigma ini diharapkan tumbuh sikap dan perilaku kemandirian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ke depan terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

* + 1. Komitmen yang tinggi atas dasar keterpanggilan dan rasa kesetiakawanan sosial perlu tetap ditumbuhkan di kalangan para pelaku usaha kesejahteraan sosial baik dari birokrat maupun masyarakat.
		2. Prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan atau memanusiakan manusia harus tetap terjaga dan terpelihara dalam rangka pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
		3. Ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dikemas melalui kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah, akan tetapi hal tersebut juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Perkembangan ke depan peranan pemerintah diperkecil, sebaliknya perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengambil peran dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial akan dapat berjalan secara sinergi dengan pembangunan lainnya.

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

KOTA SERANG

**Dra,Hj.DINAR TRICAHYANI,M.Si**

NIP.19660504 199202 2 002

**RENCANA KERJA**

**(RENJA)**

**Tahun 2019**

****

**DINAS SOSIAL (DINSOS)**

**KOTA SERANG**

**Jln. TB Suwandi No.03 Lingkar Selatan**

**Serang - Banten**